



Rekonstruksi Model Etika Kepemimpinan Publik Berbasis Nilai-Nilai Islam dalam Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Kabupaten Sidenreng Rappang)

Ahmad^{1*}, Ambo Asse², Jamaluddin Ahmad³, M.Rais Razak⁴, Nurjannah Nonci⁵, Jul⁶,
Muliani⁷, Erfina⁸

¹⁻⁸ Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

*Penulis Korespondensi: ahmad@pps.umsrappang.ac.id

Abstract. *This research is entitled "Reconstruction of the Ethical Model of Public Leadership Based on Islamic Values in Strengthening Regional Governance: A Case Study of Sidenreng Rappang Regency". The background of the research departs from the urgency of strengthening public leadership ethics in realizing clean, transparent, and integrity local governance. The challenges faced include weak integrity of the apparatus, low accountability, and lack of optimal internalization of ethical values in the bureaucracy. The purpose of the research is to analyze public leadership practices in Sidenreng Rappang Regency, identify relevant Islamic values, and reconstruct an integrative model of public leadership ethics between modern public administration principles and Islamic values. The research uses a qualitative approach with a case study method through in-depth interviews, observations, and documentation studies. Data analysis was carried out with the stages of reduction, presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that public leadership practices have led to improved governance, but still require strengthening of ethical and moral aspects. Islamic values such as trust, fairness, shiddiq, and responsibility have proven to be relevant in building leadership with integrity. The resulting reconstruction model emphasizes the integration of spirituality, professionalism, and accountability. The research recommends the systematic internalization of Islamic ethical values in bureaucratic culture, apparatus training, and public policy in order to realize a community service-oriented government.*

Keywords: Governance; Islamic Values; Model Reconstruction; Public Leadership Ethics; Sidenreng Rappang.

Abstrak. Penelitian ini berjudul "Rekonstruksi Model Etika Kepemimpinan Publik Berbasis Nilai-Nilai Islam dalam Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Sidenreng Rappang". Latar belakang penelitian berangkat dari urgensi penguatan etika kepemimpinan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan berintegritas. Tantangan yang dihadapi meliputi lemahnya integritas aparatur, rendahnya akuntabilitas, serta kurang optimalnya internalisasi nilai etika dalam birokrasi. Tujuan penelitian adalah menganalisis praktik kepemimpinan publik di Kabupaten Sidenreng Rappang, mengidentifikasi nilai-nilai Islam yang relevan, serta merekonstruksi model etika kepemimpinan publik yang integratif antara prinsip administrasi publik modern dan nilai-nilai Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kepemimpinan publik telah mengarah pada perbaikan tata kelola, namun masih memerlukan penguatan aspek etika dan moral. Nilai Islam seperti amanah, adil, shiddiq, dan tanggung jawab terbukti relevan dalam membangun kepemimpinan berintegritas. Model rekonstruksi yang dihasilkan menekankan integrasi spiritualitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Penelitian merekomendasikan internalisasi nilai etika Islam secara sistematis dalam budaya birokrasi, pelatihan aparatur, dan kebijakan publik guna mewujudkan pemerintahan berorientasi pelayanan masyarakat.

Kata kunci: Etika Kepemimpinan Publik; Nilai-Nilai Islam; Rekonstruksi Model; Sidenreng Rappang; Tata Kelola Pemerintahan.

1. LATAR BELAKANG

Kepemimpinan publik merupakan elemen kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfungsi menentukan arah kebijakan, kualitas pelayanan publik, serta efektivitas tata kelola pemerintahan. Dalam konteks modern, tuntutan terhadap pemerintah tidak hanya terbatas pada aspek administratif dan teknokratis, tetapi juga mencakup aspek etika dan moral dalam setiap proses pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, kepemimpinan publik

dituntut untuk mampu menghadirkan nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan birokrasi.

Dalam perkembangan konsep good governance, prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi menjadi standar utama dalam pengelolaan pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip tersebut sering kali masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya budaya integritas, penyalahgunaan wewenang, serta rendahnya kesadaran etis dalam birokrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan teknis saja tidak cukup untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Etika kepemimpinan publik menjadi faktor yang sangat penting dalam menjembatani kesenjangan antara regulasi formal dan praktik nyata di lapangan. Etika tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku aparatur, tetapi juga sebagai landasan moral dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, penguatan etika kepemimpinan publik menjadi kebutuhan mendesak dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia yang memiliki masyarakat religius, nilai-nilai Islam memiliki kontribusi signifikan dalam membangun sistem etika kepemimpinan publik. Nilai-nilai seperti amanah, adil, shiddiq, fathanah, dan tanggung jawab merupakan prinsip dasar yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Integrasi nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan publik dapat memperkuat dimensi moral dalam birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki dinamika pemerintahan yang menarik untuk dikaji, khususnya dalam konteks implementasi etika kepemimpinan publik. Berbagai program pembangunan dan reformasi birokrasi telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun masih terdapat tantangan dalam penguatan nilai-nilai etika dan integritas aparatur pemerintah daerah.

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa diperlukan suatu model kepemimpinan publik yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual. Rekonstruksi model etika kepemimpinan publik berbasis nilai-nilai Islam menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut, karena mampu mengintegrasikan antara prinsip administrasi modern dengan nilai-nilai keislaman yang hidup dalam masyarakat.

Model rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang lebih berintegritas, transparan, dan akuntabel. Selain itu, model ini juga diharapkan mampu menjadi rujukan konseptual bagi pengembangan kebijakan

publik yang berbasis nilai-nilai etika Islam, sehingga tercipta pemerintahan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga bermakna secara moral.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis dan merekonstruksi model etika kepemimpinan publik berbasis nilai-nilai Islam dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan praktik pemerintahan yang beretika.

2. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka dalam penelitian ini berfokus pada tiga konsep utama, yaitu etika kepemimpinan publik, tata kelola pemerintahan daerah (*good governance*), dan nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan. Ketiga konsep tersebut menjadi landasan teoritis dalam membangun rekonstruksi model kepemimpinan publik yang berorientasi pada integritas, profesionalitas, dan nilai spiritual. Integrasi ketiga aspek ini penting untuk memahami bagaimana kepemimpinan publik dapat berfungsi secara efektif dalam konteks pemerintahan daerah.

Etika kepemimpinan publik dapat dipahami sebagai seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di sektor publik. Etika ini mencakup aspek kejujuran, tanggung jawab, keadilan, transparansi, serta komitmen terhadap kepentingan masyarakat. Dalam perspektif administrasi publik modern, etika kepemimpinan menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Konsep *good governance* menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan efektif. Prinsip ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan administratif, tetapi juga pada kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam praktiknya, penerapan *good governance* sering menghadapi tantangan, terutama terkait dengan integritas aparatur dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Kepemimpinan publik memiliki peran strategis dalam menentukan arah implementasi *good governance*. Pemimpin publik tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai teladan moral dalam organisasi pemerintahan. Oleh karena itu, kualitas kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap efektivitas birokrasi dan keberhasilan pembangunan daerah.

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab di hadapan manusia dan Allah SWT. Nilai-nilai Islam seperti amanah (dapat dipercaya), adil (keadilan), shiddiq (kejujuran), fathanah (kecerdasan), dan tabligh (komunikatif) menjadi prinsip dasar dalam membangun kepemimpinan yang beretika. Nilai-nilai ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam praktik pemerintahan.

Integrasi nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan publik memberikan landasan moral yang kuat dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari capaian kinerja administratif, tetapi juga dari kualitas moral dan etika para pemimpin dan aparatur. Dengan demikian, nilai-nilai Islam dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat budaya integritas di sektor publik.

Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai objek kajian memiliki dinamika pemerintahan yang mencerminkan upaya peningkatan kualitas tata kelola daerah. Dalam praktiknya, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Namun demikian, tantangan dalam aspek etika kepemimpinan masih menjadi perhatian yang perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih holistik dan berbasis nilai.

Berdasarkan berbagai konsep tersebut, rekonstruksi model etika kepemimpinan publik berbasis nilai-nilai Islam menjadi pendekatan yang relevan untuk menjawab tantangan tata kelola pemerintahan daerah. Model ini diharapkan mampu mengintegrasikan dimensi moral, spiritual, dan profesional dalam kepemimpinan publik, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena etika kepemimpinan publik berbasis nilai-nilai Islam dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, proses, dan dinamika sosial yang terjadi dalam praktik kepemimpinan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus (case study) yang berfokus pada eksplorasi secara intensif terhadap fenomena yang terjadi pada satu lokasi tertentu. Studi kasus dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara komprehensif bagaimana etika kepemimpinan publik diterapkan dan direkonstruksi dalam konteks pemerintahan daerah yang spesifik.

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena memiliki karakteristik pemerintahan daerah yang dinamis serta

menarik untuk dikaji dalam konteks implementasi nilai-nilai etika kepemimpinan publik dan integrasi nilai-nilai Islam dalam birokrasi pemerintahan.

Subjek penelitian meliputi unsur pemerintah daerah, yang terdiri dari pejabat struktural, aparatur sipil negara, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses tata kelola pemerintahan. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap paling mengetahui dan memahami permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pandangan informan terkait etika kepemimpinan publik dan implementasi nilai-nilai Islam dalam birokrasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung praktik kepemimpinan dalam tata kelola pemerintahan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dari dokumen resmi pemerintah daerah.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini mengikuti model analisis data kualitatif Miles dan Huberman yang menekankan bahwa analisis dilakukan secara terus-menerus sejak pengumpulan data hingga penelitian selesai, sehingga menghasilkan temuan yang valid dan mendalam.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Triangulasi dilakukan untuk memastikan konsistensi data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode, sehingga meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

Tahapan penelitian dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data lapangan, analisis data, hingga penarikan kesimpulan dan penyusunan model rekonstruksi. Hasil akhir penelitian diharapkan dapat menghasilkan model etika kepemimpinan publik berbasis nilai-nilai Islam yang aplikatif dan dapat digunakan dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menggambarkan temuan terkait etika kepemimpinan publik berbasis nilai-nilai Islam dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa praktik kepemimpinan publik telah mengarah pada upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, meskipun masih terdapat variasi dalam penerapan nilai etika di tingkat

implementasi birokrasi.

Temuan pertama menunjukkan bahwa kepemimpinan publik di lingkungan pemerintah daerah telah berupaya mengintegrasikan prinsip transparansi dalam proses administrasi dan pelayanan publik. Hal ini terlihat dari peningkatan keterbukaan informasi dan penggunaan sistem digital dalam beberapa layanan pemerintahan. Namun demikian, implementasinya masih belum merata di seluruh organisasi perangkat daerah.

Temuan kedua menunjukkan bahwa nilai amanah dan tanggung jawab mulai menjadi bagian dari kesadaran aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas. Sebagian pejabat dan pegawai menunjukkan komitmen moral dalam melayani masyarakat, meskipun masih terdapat kasus-kasus yang menunjukkan lemahnya disiplin etika kerja pada sebagian unit kerja tertentu.

Temuan ketiga berkaitan dengan nilai keadilan dalam pelayanan publik. Pemerintah daerah telah berupaya memberikan pelayanan yang lebih inklusif kepada masyarakat, namun masih terdapat tantangan dalam pemerataan akses layanan, terutama pada wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Temuan keempat menunjukkan bahwa nilai shiddiq (kejujuran) dan fathanah (kecerdasan) dalam kepemimpinan publik belum sepenuhnya terinternalisasi secara sistemik. Hal ini terlihat dari masih adanya praktik administrasi yang kurang transparan serta kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur dalam pengambilan keputusan berbasis data.

Temuan kelima mengungkap bahwa budaya organisasi pemerintahan daerah masih berada pada tahap transisi menuju budaya kerja berbasis etika. Upaya reformasi birokrasi telah dilakukan, namun internalisasi nilai-nilai Islam dalam sistem kerja belum berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Temuan keenam menunjukkan bahwa faktor kepemimpinan kepala daerah dan pejabat struktural memiliki pengaruh signifikan terhadap penguatan etika birokrasi. Pemimpin yang memiliki keteladanan moral mampu mendorong peningkatan disiplin dan etos kerja aparatur di lingkungan kerja masing-masing.

Temuan ketujuh mengarah pada perlunya model rekonstruksi etika kepemimpinan publik berbasis nilai Islam yang lebih sistematis. Model ini dibutuhkan untuk mengintegrasikan nilai spiritual, etika birokrasi, dan prinsip good governance dalam satu kerangka kerja yang operasional.

Tabel 1. Temuan Penelitian.

No	Aspek Kajian	Temuan Utama	Makna/Implikasi
1	Transparansi	Meningkat melalui digitalisasi layanan	Perlu pemerataan implementasi
2	Amanah	Ada komitmen moral aparat	Belum konsisten di semua unit
3	Keadilan	Upaya layanan inklusif	Masih ada ketimpangan akses
4	Kejujuran (Shiddiq)	Belum sepenuhnya terinternalisasi	Perlu penguatan integritas
5	Kecerdasan (Fathanah)	Pengambilan keputusan belum optimal berbasis data	Perlu peningkatan kompetensi
6	Budaya organisasi	Masa transisi etika birokrasi	Perlu sistem internalisasi nilai
7	Kepemimpinan	Berpengaruh kuat terhadap etika ASN	Keteladanan menjadi kunci
8	Model rekonstruksi	Dibutuhkan model integratif	Menggabungkan Islam & good governance

Pembahasan

Pembahasan ini menegaskan bahwa etika kepemimpinan publik merupakan faktor fundamental dalam menentukan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip good governance telah diupayakan, implementasinya masih membutuhkan penguatan pada aspek nilai dan moralitas kepemimpinan.

Integrasi nilai amanah dalam kepemimpinan publik menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Amanah tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab administratif, tetapi juga sebagai komitmen spiritual yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan.

Nilai keadilan dalam pelayanan publik menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya mengurangi kesenjangan akses layanan. Namun, secara teoritis hal ini masih sejalan dengan konsep Rawls tentang keadilan distributif, yang menekankan kesetaraan akses terhadap layanan publik sebagai hak dasar warga negara.

Nilai shiddiq dan fathanah dalam kepemimpinan publik menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan integritas dan kompetensi aparat. Dalam perspektif administrasi publik modern, hal ini berkaitan dengan prinsip *evidence-based decisionmaking* yang menuntut kejujuran data dan kecerdasan analitis dalam pengambilan kebijakan.

Budaya organisasi pemerintahan yang masih dalam masa transisi menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural. Transformasi nilai membutuhkan proses internalisasi yang berkelanjutan melalui keteladanan pemimpin dan sistem penguatan etika kerja.

Peran kepemimpinan dalam penguatan etika birokrasi sangat signifikan. Teori kepemimpinan transformasional menjelaskan bahwa pemimpin yang mampu menjadi teladan moral dapat meningkatkan motivasi dan kinerja bawahan secara efektif, sebagaimana terlihat dalam temuan penelitian ini.

Rekonstruksi model etika kepemimpinan publik berbasis nilai Islam menjadi kebutuhan konseptual dan praktis dalam penelitian ini. Model tersebut mengintegrasikan nilai spiritual Islam dengan prinsip administrasi modern untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih humanis dan berintegritas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan daerah tidak cukup hanya melalui pendekatan struktural dan prosedural, tetapi juga memerlukan internalisasi nilai-nilai etika berbasis Islam. Dengan demikian, model rekonstruksi yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi solusi alternatif dalam memperkuat kualitas kepemimpinan publik di Kabupaten Sidenreng Rappang.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa etika kepemimpinan publik di Kabupaten Sidenreng Rappang telah menunjukkan adanya arah positif dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta perbaikan kualitas pelayanan publik sudah mulai diterapkan, meskipun belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi nilai-nilai etika secara menyeluruh dalam birokrasi.

Nilai-nilai Islam seperti amanah, adil, shiddiq, dan fathanah memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat integritas kepemimpinan publik. Nilai-nilai tersebut terbukti relevan dalam membangun budaya kerja aparatur yang lebih bertanggung jawab, jujur, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, namun internalisasinya masih perlu diperkuat melalui sistem dan keteladanan kepemimpinan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, rekonstruksi model etika kepemimpinan publik berbasis nilai-nilai Islam menjadi sangat penting untuk diimplementasikan sebagai pendekatan integratif dalam tata kelola pemerintahan daerah. Model ini diharapkan mampu menjadi landasan dalam menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan berintegritas, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang.

REFERENCES

- Ahmad, J., Mustanir, A., & Razak, M. R. R. (2026). *Implementasi Smart Village dalam Mitigasi Bencana: Perspektif Kebijakan dan Tata Kelola Berbasis Regulasi di Kota Parepare*. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 5(3), 824–836.
- Ahmad, J., Mustanir, A., Lubis, S., Rasak, M. R. R., & Karunia, R. L. (2026). *Bridging Global Evidence and Local Realities: The Rais-MR3 Digital Governance Model for Transforming Village Fund Management*. *Frontiers in Sustainability*, 7, 1811625.

- Ahmad, J., Nonci, N., Zainuddin, A. M., Astuti, Y., & Gafur, A. (2026). *Digitalization of Police Services as Public Service Innovation: A Case Study of the Parepare Police*. Journal of Local Government Issues, 9(1).
- Al-Farabi. (2001). *Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah* (The Virtuous City).
- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Unpad Press.
- Al-Mawardi. (1996). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Islamic Governance Theory.
- Bappenas. (2017). *Agenda SDGs Indonesia 2030*. Kementerian PPN.
- Bass, B. M. (1985). *Leadership and Performance Beyond Expectations*. Free Press.
- Burns, J. M. (1978). *Leadership*. Harper & Row.
- Indirwan, S. I., Sam, M., Nilwana, A., & Irwan. (2024). *Implementation of Transparency Principles in Governance of Sidenreng Rappang Regency*. JGLP.
- Jabbar, A., Muliani, M., Ahmad, J., Razak, M. R. R., Lubis, S., & Khaerunnisa, M. (2026). *Perbandingan Sistem Pengawasan Lalu Lintas antara Singapura dan Indonesia: Studi Benchmarking Internasional*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka, 4(3), 4324–4331.
- Lubis, S., Nurmandi, A., Ahmad, J., Purwaningsih, T., & Jovita-Olvez, H. D. (2026). *Understanding Urban–Rural Disparities in Digital Government Maturity: A Governance Perspective*. Frontiers in Political Science, 8, 1779611.
- Mustanir, A. (2020). *Village Head Leadership and Bureaucratic Model Towards Good Governance in Sidenreng Rappang*. EAI Proceedings.
- Mustanir, A., Ar, A. A., & Syarifuddin, H. (2021). *Disiplin ASN di Kabupaten Sidenreng Rappang*. Jurnal Sosial Politika.
- Mustanir, A., Razak, M. R. R., & Ali, A. (2021). *Policy Implementation on ASN Discipline in Sidenreng Rappang*. JSP Journal.
- Northouse, P. G. (2019). *Leadership: Theory and Practice*. Sage Publications.
- Putra, A. H., Samiri, M., & Nilwana, A. (2026). *Good Governance dalam Penanganan Kasus Kriminal di Sidenreng Rappang*. JDP.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Razak, M. R. R., Ahmad, J., Mustanir, A., Lubis, S., & Rustan, R. (2026). *Peningkatan Aksesibilitas Layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas melalui Adaptasi Best Practice di Singapura*. JPMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam, 6(1), 91–99.
- Sulaeman, Z., Mustanir, A., & Muchtar, A. I. (2019). *Partisipasi Masyarakat Terhadap Good Governance di Sidenreng Rappang*. PRAJA Journal.
- Sundari, S., Ahmad, J., Mustanir, A., Rasak, M. R. R., & Jumiati, J. (2025). *Governansi Digital dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Transformasi*. CV Eureka Media Aksara.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. UN.
- Weber, M. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization*. Oxford University Press.
- Yukl, G. (2013). *Leadership in Organizations*. Pearson.